



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
13. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
14. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
15. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp240.459.023.439,00
a) Pajak Daerah	Rp101.018.267.539,00
b) Retribusi Daerah	Rp37.575.755.900,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp830.000.000,00
d) Lain-lain PAD yang sah	Rp101.035.000.000,00
2. Pendapatan Transfer	Rp979.558.825.548,00
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp922.094.515.000,00
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp57.464.310.548,00
Jumlah Pendapatan	Rp0,00

b. Belanja:

1. Belanja Operasi	Rp1.037.913.830.025,00
a) Belanja Pegawai	Rp530.893.248.641,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp438.681.872.134,00
c) Belanja Bunga	Rp32.500.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp32.948.709.250,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp2.890.000.000,00
2. Belanja Modal	Rp348.897.398.991,00
a) Belanja Modal Tanah	0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp23.480.232.575,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp51.532.893.600,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp268.222.547.616,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp661.725.200,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp5.000.000.000,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp5.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	Rp5.000.000.000,00
4. Belanja Transfer	Rp192.206.619.971,00
a) Belanja Bagi Hasil	Rp14.596.515.771,00
b) Belanja Bantuan keuangan	Rp177.610.104.200,00
Jumlah Belanja	Rp1.584.017.848.987,00
Surplus/(Defisit)	Rp(364.000.000.000,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp380.000.000.000,00
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp30.000.000.000,00
b) Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp350.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp16.000.000.000,00
a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp16.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp364.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD yang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PANGANDARAN,



JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 104



KABUPATEN PANGANDARAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240.459.023.439,00
4.1.01	Pajak Daerah	101.018.267.539,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	25.426.380.874,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	25.426.380.874,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	25.426.380.874,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.527.755.265,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.527.755.265,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.527.755.265,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.473.849.585,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.473.849.585,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.473.849.585,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.485.860.725,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.485.860.725,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.485.860.725,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	21.349.110.622,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	21.349.110.622,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	21.349.110.622,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	185.089.223,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	185.089.223,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	185.089.223,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	444.621.245,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	444.621.245,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	444.621.245,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	36.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	36.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	36.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	120.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	120.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.689.600.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	25.689.600.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	25.689.600.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.280.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	14.280.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	14.280.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	37.575.755.900,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.459.086.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	20.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.794.086.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.794.086.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	165.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	165.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	480.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	120.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	360.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	33.116.669.900,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	75.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.050.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.050.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.143.534.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.143.534.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.848.135.900,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.848.135.900,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	830.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	830.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	830.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	830.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.035.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	35.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	35.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	35.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	100.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	100.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	100.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	979.558.825.548,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	922.094.515.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	825.038.178.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	53.491.968.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.292.714.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	25.048.091.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.445.693.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.935.474.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	6.749.597.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	477.595.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.107.623.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.435.181.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	554.021.397.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	554.021.397.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.756.443.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.643.072.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.183.081.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.888.248.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.981.723.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	6.844.277.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.616.084.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.491.388.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.928.328.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.422.551.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.757.691.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	152.768.370.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	42.348.900.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.025.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	75.741.720.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.774.274.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.090.400.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.255.441.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	602.840.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	650.000.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	554.511.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.109.600.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.170.816.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.354.868.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	97.056.337.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	97.056.337.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	97.056.337.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.464.310.548,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57.464.310.548,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.464.310.548,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.595.651.705,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.822.838.802,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.862.868.380,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.363.796,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.180.587.865,00
	Jumlah Pendapatan	1.220.017.848.987,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.037.913.830.025,00
5.1.01	Belanja Pegawai	530.893.248.641,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	332.051.534.030,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	257.363.626.104,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	190.968.996.011,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	66.394.630.093,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.421.731.752,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.150.829.531,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.270.902.221,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.045.317.766,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.045.317.766,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.846.413.063,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.898.068.021,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.948.345.042,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.112.413.772,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.112.413.772,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.736.975.767,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.325.381.326,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.411.594.441,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	424.839.361,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	424.839.361,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.229.481,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.187.461,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.042.020,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.037.118.044,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.812.415.012,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.224.703.032,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	556.030.664,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	418.456.797,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	137.573.867,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.502.838.256,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.228.616.102,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	274.222.154,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	77.294.489.056,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	59.129.181.810,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	58.555.314.860,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	573.866.950,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.603.339.407,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.603.339.407,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.799.588.500,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.799.588.500,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	12.762.379.339,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12.762.379.339,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.482.897.286,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.060.000.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.060.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.507.131.638,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	35.504.203,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	56.927.435,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.260.000.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	4.700.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	61.079.784.480,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	61.079.784.480,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	402.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	402.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.714.305.202,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.774.417.902,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	574.887.300,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	365.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	685.466.446,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	100.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	585.466.446,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	14.661.935.520,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	14.661.935.520,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.372.274.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	1.372.274.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.158.146.447,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	147.772.700,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	147.772.700,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	123.717.490,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	123.717.490,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.060.693,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.060.693,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.995.103,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.995.103,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	510.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	510.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	36.118,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	36.118,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.236.711.843,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	98.917.560,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.248.571,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.745.712,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.128.800.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.884.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.884.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.750.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.750.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	191.143.243,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.561.500,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.561.500,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.387.380,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.387.380,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.751.108,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.751.108,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.858.898,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.858.898,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	528.867,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	528.867,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	16.817.477,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	16.817.477,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.643.560,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.643.560,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	398.613,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	398.613,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.195.840,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.195.840,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	851.256.387,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	649.656.387,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	649.656.387,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	12.863.782.192,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	12.863.782.192,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	12.863.782.192,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.681.872.134,00
5.1.02.01	Belanja Barang	81.054.024.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.987.329.397,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	590.816.220,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	405.688.345,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.528.648.595,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	150.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	132.826.484,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.030.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	766.677.680,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.070.890.695,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.622.000.986,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.762.429.214,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	118.269.605,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	62.820.320,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	135.815.695,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	440.419.665,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	81.000.800,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	465.312.897,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.820.978.939,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.009.187.152,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	60.250.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	339.789.045,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	36.725.881.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	794.274.194,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	663.925.818,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	256.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.303.441.129,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.614.335.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.055.543.710,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	197.896.080,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	5.250.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.038.870,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	841.567.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	104.029.020,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	383.496.230,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.976.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	931.891.209,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.515.107.800,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	270.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	270.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	66.425.053,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	53.070.429,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.949.471,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	9.405.153,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	155.196.463.477,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	98.285.374.878,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	180.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.581.850.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.363.005.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	653.900.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	500.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	2.754.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.303.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.422.500.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	52.310.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	468.610.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.628.745.600,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.784.836.800,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	305.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	65.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	361.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	511.800.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	319.200.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	472.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.939.934.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.081.350.540,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.653.300.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.401.731.200,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.518.400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.382.065.600,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	86.600.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.454.728.000,00
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	2.008.800.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	69.600.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	114.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.556.632.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	125.494.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.364.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	172.250.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	158.759.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.753.312.991,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	487.554.372,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.892.370.775,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	53.550.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	463.260.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	144.025.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	130.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.250.446.065,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.934.375.116,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	18.199.147.339,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.864.473.310,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	840.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	123.028.800,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	128.581.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.175.900.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.169.500.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	6.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.462.772.454,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	47.500.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	20.300.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.008.960.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.803.800.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	35.700.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.071.012.454,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	378.500.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	36.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	20.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.277.550.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.344.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.055.750.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.788.300.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	59.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.919.182.620,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	267.050.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	993.680.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	35.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.615.819.970,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	90.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	140.744.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	776.888.650,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.046.005.460,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	371.200.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	262.177.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	25.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	91.290.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.089.798.550,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.165.000.000,00
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	41.539.110,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	488.500.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	488.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.290.732.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	522.682.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	9.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	6.749.050.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	9.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.960.623.775,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	920.000,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	920.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.705.250.575,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	28.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.456.076.350,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.164.624.225,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	567.045.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	43.455.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	109.250.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	236.800.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.566.619.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.835.359.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	681.260.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.287.834.200,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.265.283.200,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.422.551.000,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00
5.1.02.03.04.0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	4.600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	400.000.000,00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.954.897.124,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.954.897.124,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.565.831.449,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.824.425.675,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.179.540.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	385.100.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.166.151.600,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.614.951.600,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	838.750.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	198.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	500.000.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	72.201.600,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	6.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	551.200.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	550.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.200.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.950.792.400,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.950.792.400,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.950.792.400,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.525.684.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.525.684.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.525.684.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	96.873.235.308,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	96.873.235.308,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	96.873.235.308,00
5.1.03	Belanja Bunga	32.500.000.000,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	32.500.000.000,00
5.1.03.03.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	32.500.000.000,00
5.1.03.03.06.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	32.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	32.948.709.250,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.000.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	18.000.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	18.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.039.091.250,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.240.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.240.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.799.091.250,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.100.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	699.091.250,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.869.700.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.869.700.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.869.700.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.039.918.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.039.918.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.039.918.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.890.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.890.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.890.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.890.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	348.897.398.991,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.480.232.575,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	908.769.893,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	908.769.893,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	883.790.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	6.679.893,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	18.300.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	605.303.970,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	605.303.970,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	228.773.970,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	376.530.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	176.729.626,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	176.729.626,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	134.213.150,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	42.516.476,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.216.678.363,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.877.329.793,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.318.422,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.874.011.371,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.322.675.107,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.833.433.846,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	136.832.851,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	296.510.889,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.511.063,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.411.950,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	28.974.508,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.673.463,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	16.673.463,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.687.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	48.358.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	12.500.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	35.858.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	5.329.000,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	5.329.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.734.000.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.275.074.952,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	90.976.168,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	853.551.563,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	487.109.223,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	2.843.437.998,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.458.925.048,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.458.925.048,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.462.773,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	0,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5.462.773,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.09.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat	5.462.773,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.850.498.066,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.498.487.789,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	91.100.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.799.665.629,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	607.722.160,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	352.010.277,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	59.261.887,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	292.748.390,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	155.915.000,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	155.915.000,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	155.915.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	750.000,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	750.000,00
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	750.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	230.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	230.000.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	230.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.191.310.344,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.191.310.344,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.191.310.344,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	576.554.040,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	576.554.040,00
5.2.02.19.01.0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	80.554.040,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	496.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.069.591.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.069.591.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.069.591.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.704.982.500,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.704.982.500,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.704.982.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.532.893.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	51.532.893.600,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.532.893.600,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.804.210.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	31.379.183.600,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	3.849.500.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	268.222.547.616,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	268.184.547.616,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	258.864.829.616,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	258.864.829.616,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.319.718.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.319.718.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	38.000.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	20.000.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	20.000.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	18.000.000,00
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	18.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	661.725.200,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	18.000.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	18.000.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	18.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	71.408.600,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	71.408.600,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	71.408.600,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	88.500.000,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	88.500.000,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	88.500.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	483.816.600,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	483.816.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	483.816.600,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	192.206.619.971,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.596.515.771,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.784.796.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.784.796.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.784.796.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.811.719.771,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.811.719.771,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.811.719.771,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	177.610.104.200,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	177.610.104.200,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	177.610.104.200,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	20.547.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	97.056.337.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	60.006.767.200,00
	Jumlah Belanja	1.584.017.848.987,00
	Total Surplus/(Defisit)	-364.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	380.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	13.558.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	13.558.000.000,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	13.558.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16.442.000.000,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.442.000.000,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.442.000.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	350.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	350.000.000.000,00
6.1.04.03.06	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	350.000.000.000,00
6.1.04.03.06.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	350.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.000.000.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	16.000.000.000,00
6.2.03.03.06	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	16.000.000.000,00
6.2.03.03.06.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	16.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	364.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Pangandaran, 29 Desember 2023

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA